

RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR TIMUR PULAU WEH KOTA SABANG, ACEH

Buku 2: Data dan Informasi



**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN
KOTA SABANG, PROVINSI ACEH
2010**

BUKU 2:

RENCANA PENGELOLAAN

KKP PESISIR TIMUR PULAU WEH-KOTA SABANG

DATA DAN ANALISIS

**DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA SABANG**



2010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Sabang bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) telah dapat memfasilitasi pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh seluas 3.207,98 Ha dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 729 Tahun 2010 tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh.

Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan ini akan ditindaklanjuti dengan penetapan yang disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Guna penetapan suatu kawasan konservasi perairan dipersyaratkan untuk menyusun sebuah rencana pengelolaan (*Management Plan*) kawasan itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya nanti dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, Buku 2 Rencana Pengelolaan ini di susun sebagai bagian dalam penetapan sebagaimana dimaksudkan di atas.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program ini, mulai dari kerja fasilitasi di lapangan sampai kepada penyusunan dokumen rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh ini.

Sabang, Desember 2010,

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
Kota Sabang

ABI ROIB, SE

NIP : 19530925 197901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	1
BAB 2. Kerangka Pemikiran dan Metode	2
2.1 Kerangka Pemikiran.....	2
2.2 Metode Penyusunan Rencana Pengelolaan.....	3
2.3 Pengumpulan Data	4
2.4 Analisis Data	5
2.4.1. Analisis Hukum dan Kebijakan	5
2.4.2. Analisis Hirarki Proses	6
2.4.3. Analisis SWOT	6
2.4.4. Analisis 5S Partisipatif	7
2.5 Konsultasi Publik	8
BAB 3. Potensi	9
3.1 Oseanografi dan Iklim	9
3.2 Sumberdaya pesisir	10
3.3 Sosial Budaya	12
3.4 Panglima Laut	13
3.5 Dukungan masyarakat	15

3.6	Ekonomi	17
	3.6.1 Perikanan Tangkap	18
	3.6.2. Pariwisata	19
BAB 4. Isu dan Permasalahan		20
4.1	Degradasi terumbu karang	20
4.2	Eksploitasi berlebihan sumberdaya ikan	20
4.3	Penurunun Kualitas Pantai	21
4.4	Konflik sosial	21
4.5	Melemahnya penerapan aturan adat	21
4.6	Rendahnya kesadaran masyarakat	22
BAB 5. Analisis Rencana Pengelolaan Dan Zonasi		23
5.1	Analisis Rencana Pengelolaan	23
	5.1.1 Dasar Hukum dan Kebijakan	23
	5.1.2 Analitical Hierarchy Process	24
	5.1.3 Analisis SWOT	25
	5.1.4 Analisis 5S Partisipatif	31
5.2	Analisis Rencana Zonasi	32
BAB 6. Opsi-Opsi Rencana Pengelolaan dan Zonasi		33
6.1	Opsi-opsi Pengelolaan	33
	6.1.1 Opsi Kelembagaan	33
	6.1.2 Opsi Strategi Pengelolaan	33
6.2	Opsi-opsi Zonasi	34
BAB 7. Penutup		36
Daftar Pustaka		37
Lampiran		39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbandingan persentase tutupan karang keras di wilayah Pulau Weh dan Pulo Aceh.....	4
Gambar 2	Sebaran kekayaan jenis ikankarang di beberapa wilayah kerja Panglima Laot di Pulau Weh dan Pulo Aceh.....	4
Gambar 3.	Biomassa ikan karang di seluruh wilayah Panglima Laot di Pulau Weh dan Pulo Aceh.....	5
Gambar 4.	Rata-rata hasil tangkapan ikan per unit upaya (kg/trip) di masing-masing wilayah penangkapan di Pulau Weh.....	8
Gambar 5.	Struktur lembaga pengelola KKP Pesisir Timur Pulau Weh	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penilaian Skala Berpasangan.....	6
Tabel 2.	Matriks Analisis SWOT.....	7
Tabel 3.	Sebaran penduduk di pesisir timur Pulau Weh.....	12
Tabel 4.	Mata pencaharian penduduk pesisir timur Pulau Weh.....	17
Tabel 5.	Sarana dan prasarana di pesisir timur Pulau Weh.....	17
Tabel 6.	Matriks SWOT Pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh.....	27
Tabel 7.	Matriks Faktor Eksternal.....	28
Tabel 8.	Matriks Faktor Internal.....	28
Tabel 9.	Matriks Penentuan Rangkings Strategi Pengelolaan.....	30
Tabel 10.	Matriks Sumberdaya, Ancaman dan Strategi Penanganan Lhok Ie Meulee.....	31
Tabel 11	Matriks Sumberdaya, Ancaman dan Strategi Penanganan Lhok Anoe Itam	32

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kawasan Pesisir Timur Pulau Weh-Kota Sabang, yang terbentang mulai dari Pantai Kasih di Gampong Kuta Ateuh hingga ke Ujung Seuke di Gampong Anoe Itam, memiliki potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati serta potensi pesisir lainnya yang dapat mendukung sektor perikanan dan pariwisata. Kondisi ini didukung oleh cukup tingginya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi pesisir dan laut. Modal sosial berupa adanya hukum adat laut juga turut mendukung upaya-upaya pelestarian sumberdaya pesisir di wilayah ini. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat dan pihak pemerintah Kota Sabang untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perikanan berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Sabang nomor 729 tahun 2010 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang, maka perlu di susun sebuah rencana pengelolaan memuat informasi mengenai potensi, permasalahan, arah kebijakan, penataan zonasi, rencana perlindungan, rencana aksi, dan kegiatan yang akan dilakukan pihak pengelola dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Rencana Pengelolaan diperlukan sebagai salah satu syarat agar pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi efektif dengan capaian yang dapat terukur. Tanpa adanya sebuah rencana pengelolaan, pihak pengelola akan kesulitan dalam menentukan arah pengelolaan, monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan. Rencana pengelolaan juga diperlukan agar program-program prioritas untuk pengelola dapat dipetakan dengan baik.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (RP-KKP) Pesisir Timur Pulau Weh - Kota Sabang ini adalah untuk memformulasikan rencana RP-KKP Pesisir Timur Pulau Weh yang berisi arah kebijakan pengelolaan, penataan zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi lima tahun pertama. RP-KKP ini nantinya akan menjadi acuan dan arahan bagi lembaga pengelola serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan di dalam KKP Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang.

BAB 2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI

2.1 Kerangka Pemikiran

Terjaganya sumberdaya pesisir, pada hakikatnya tidak hanya menguntungkan bagi nelayan kecil saja, melainkan para pelaku dan pengusaha pariwisata dan pemerintah. Hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya pembangunan fasilitas wisata berupa resort dan bungalow di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh, meliputi wilayah Sumur Tiga hingga ke Anoe Itam. Tanpa sebuah upaya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam pesisir yang nyata, maka sumberdaya pesisir yang ada saat ini akan mengalami penurunan kualitas sehingga pada akhirnya akan merugikan kegiatan perikanan dan pariwisata di daerah tersebut, yang tentunya akan menimbulkan kerugian secara ekonomi.

Pada tahun 1970-1980 pengelolaan sumberdaya di Indonesia menganut pola pengelolaan berbasis negara (*state-based management*). Pola pengelolaan tersebut memberikan ruang kepada segelintir orang, terutama penguasa dan pengusaha untuk mengeksploitasi sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir. Sedangkan masyarakat kecil termasuk di pesisir hanya memperoleh manfaat yang sedikit. Hal tersebut terjadi karena pola pembangun dan pengelolaan sumberdaya tidak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Pada tahun 1980-1998 para pemerhati lingkungan menyadari kekurangan pola pengelolaan tersebut. Mereka mulai memperjuangkan sebuah pengelolaan berbasis masyarakat dengan pendekatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat atau kearifan lokal.

Tahun 1999 terjadi perubahan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi dapat diartikan sebagai proses pengalihan wewenang, (dalam hal ini mencakup kelembagaan, fiskal dan politik) dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga dibawahnya yang secara geografis lebih dekat ke sumber-sumber daya alam yang akan dikelola atau dilestarikan, dalam hal ini pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Wyckoff - Baird et al., 2001).

Penerapan sistem otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya. Hal ini tercantum dalam UU No 22 dan 25 tahun 1999. Undang-undang tersebut didasari oleh ketetapan MPR-RI No.XV/MPR/1998, tentang Otonomi Daerah. Disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mengelola 12 mil laut dari garis pantai. Kewenangan daerah terhadap sumberdaya kelautan meliputi kewenangan dalam hal: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan (d) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut (Dahuri, 2003).

Otonomi daerah tidak hanya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya, tetapi memberikan ruang juga kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kolaboratif. Pengelolaan kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang dikenal dengan *Co-management* dapat menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut. Dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan secara langsung atau tidak akan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan (Rudyanto, 2004).

Di Aceh khususnya Pulau Weh, gerakan untuk kembali ke nilai adat atau kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam mendapat angin segar dengan lahirnya UU No. 11 tahun 2006. UU tersebut mengamanatkan untuk mengaktifkan kembali lembaga adat seperti lembaga mukim, gampung dan Panglima Laôt. Hal tersebut diperkuat oleh Qanun Provinsi Aceh No 9 dan 10 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang termasuk di dalamnya pelaksanaan kehidupan adat dan lembaga adat.

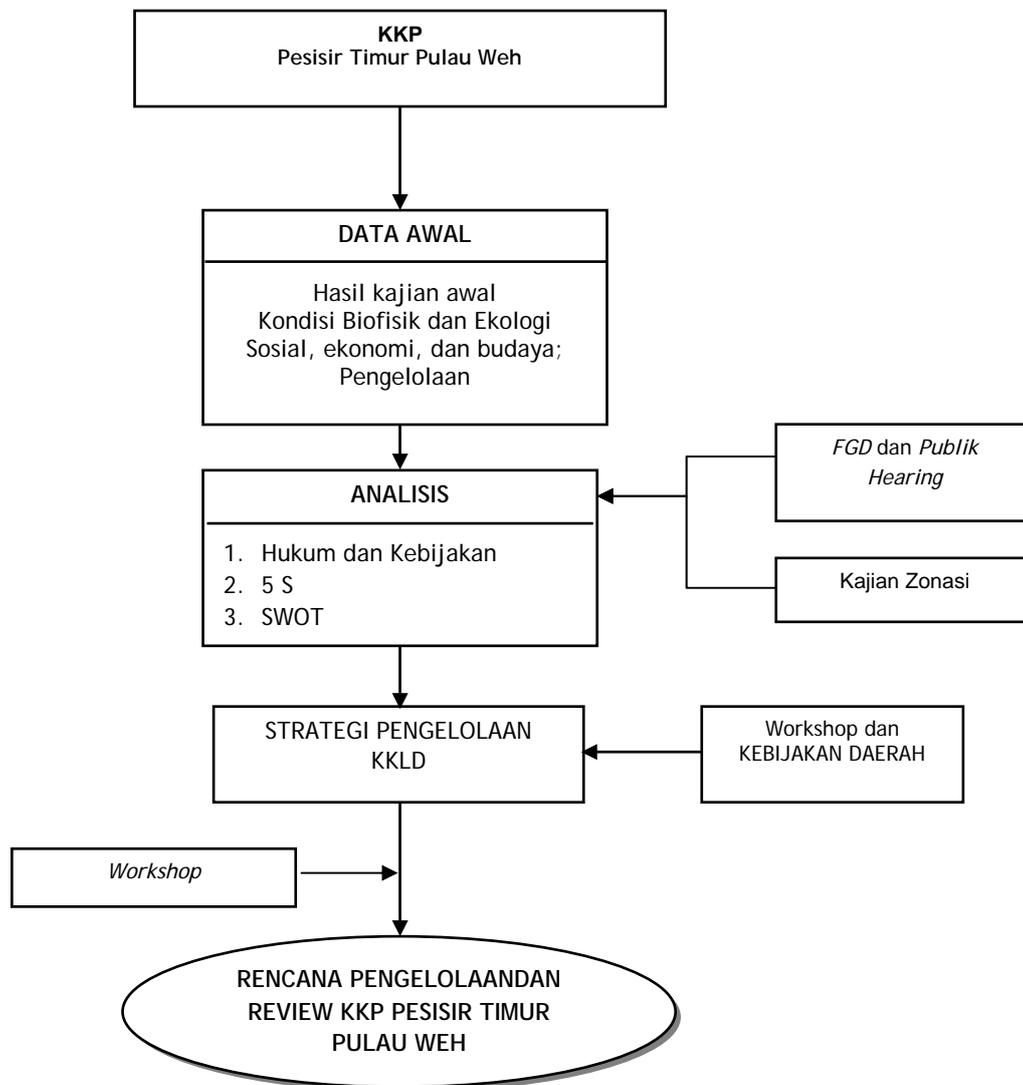
2.2 Metode Penyusunan Rencana Pengelolaan

Beberapa tahapan kegiatan dan studi dilakukan dalam penyusunan rencana pengelolaan di Kawasan Konservasi Pesisir Timur Pulau Weh. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Pengumpulan data
- b. Konsultasi publik pada tingkat lhok
- c. Konsultasi publik pada tingkat kota
- d. Penyusunan draft Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi KKP Pesisir Timur Pulau Weh
- e. Workshop 1
- f. Perbaikan draft Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi KKP Pesisir Timur Pulau Weh
- g. Workshop 2
- h. Finalisasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi KKP Pesisir Timur Pulau Weh.

Analisis-*analisis* yang dilakukan dalam penyusunan rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh yang dilakukan antara lain:

- a. Analisis Hukum dan Kebijakan
- b. Analisis 5 S
- c. Analisis SWOT



Gambar 1. Kerangka kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh

2.3 Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data antara lain dengan menggunakan kuesioner, *semistructured-interview* dan *focus group discussion* (FGD). Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan data primer dari KKP Pesisir Timur Pulau Weh. Data yang dikumpulkan antara lain:

- a. Data mengenai identifikasi KKP Pesisir Timur Pulau Weh berupa data tabular dan data spasial yang mencakup:
 - Data kondisi biofisik, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya
- b. Parameter biofisik dan ekologi antara lain :
 - Iklim (angin, musim, curah hujan, dan lain-lain)
 - Hidrooseanografi (kualitas air, pasang surut, arus, gelombang, dan lain-lain).
 - Biota perairan (terumbu karang dan ikan karang).
- c. Parameter sosial, budaya, dan ekonomi antara lain :
 - Jumlah dan kepadatan penduduk,
 - Tingkat pendidikan,
 - Kelembagaan masyarakat,
 - Etnik, seni dan budaya lokal,
 - Sarana dan prasarana daerah,
 - Mata pencaharian dan tingkat pendapatan.
 - Pengelolaan sumberdaya alam
 - Pola pemanfaatan sumberdaya alam
- d. Parameter pengelolaan SAP antara lain :
 - Sumberdaya penting, ancaman, sumber ancaman dan strategi penangan
 - Parameter kelemahan, kekuatan , peluang dan ancaman pada pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh
 - Rekomendasi strategi pengelolaan

2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh antara lain; Analisis Hukum dan Kebijakan, *Analitical Hierarchy Process* (AHP), Analisis SWOT, dan Analisis 5S.

2.4.1 Analisis Hukum dan Kebijakan

Banyaknya undang-undang yang mengatur tentang kawasan konservasi laut di Indonesia membuat berbagai pihak memiliki opsi-opsi alternatif dalam mengembangkan kawasan konservasi baik dari segi status, bentuk, dasar hukum ataupun lembaga pengelola. Selain itu pemberian otonomi khusus pada Nangroe Aceh Darussalam menambah warna tersendiri dalam menerapkan pengelolaan sumberdaya pesisir serta landasan hukum-nya.

Teknik analisis yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris atau dalam bahasa hukum dikenal dengan *Socio Jurisprudence*. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sosial di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Analisis Hirarki Proses

Analisis proses hirarki merupakan suatu teknik analisa terstruktur untuk pengambilan keputusan yang sangat kompleks. Teknik ini berdasarkan perhitungan matematis dan psikologi responden dikembangkan pertama kali oleh Saaty pada tahun 1980. Teknik AHP memberikan kerangka yang rasional dan komprehensif dalam menyusun struktur masalah, mengukur dan menghubungkan elemen-elemen untuk capaian dalam pengambilan keputusan dan menentukan solusi alternatif. Dalam penelitian ini struktur AHP terdiri dari 3 level yaitu; level 1: *goal* yang merupakan pemilihan jenis kawasan konservasi yang sesuai di wilayah Mukim Ie Meulee, level 2: tahapan yang merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk pengembangan kawasan konservasi, dan level 3: aktor yang merupakan aktor-aktor yang akan berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Setiap elemen dari suatu level/tingkat akan diperbandingkan secara berpasangan. Penentuan seberapa besar pentingnya suatu elemen terhadap elemen lainnya digunakan skala perbandingan dari Saaty (1990) (Tabel 1).

Tabel 1. Penilaian Skala Berpasangan.

Nilai	Definisi
1	Kedua faktor sama pentingnya
3	Faktor yang satu sedikit lebih penting dari faktor lainnya
5	Faktor satu esensial atau lebih penting dari faktor lainnya
7	Satu faktor jelas lebih penting dari faktor lainnya
9	Satu faktor mutlak lebih penting dari pada faktor lainnya
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara

2.4.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengelolaan. Tahap awal analisis SWOT adalah identifikasi faktor internal dan faktor eksternal pengelolaan kawasan konservasi. Faktor internal terdiri dari komponen kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Faktor eksternal terdiri dari komponen peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Faktor-faktor tersebut kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan strategi pengelolaan.

Strategi-strategi rencana pengelolaan KKP secara umum didapat dari menganalisis SWOT dengan menggunakan matriks SWOT berikut. Matriks analisis SWOT disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Analisis SWOT.

Internal		
Eksternal	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT

Matriks SWOT dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

- a) **Strategi SO** yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada.
- b) **Strategi ST** yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang dihadapi.
- c) **Strategi WO** yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada dengan mengatasi kelemahan-kelemahan.
- d) **Strategi WT** yaitu berusaha meminimumkan kelemahan dengan menghindari ancaman yang ada.

Strategi yang dihasilkan kemudian ditentukan prioritasnya dengan menentukan bobot dan nilai *attractive score* (AS). Bobot merupakan ranking umum komponen-komponen yang ada dimana jumlah akumulasi komponen dalam satu faktor adalah 1. *Attractive score* (AS) adalah pengaruh masing-masing komponen terhadap masing-masing strategi pengelolaan dengan penilaian: 1; jika tidak dapat diterima, 2; jika mungkin dapat diterima, 3; kemungkinan besar dapat diterima dan 4; dapat diterima. Setelah itu dihitung *weighted attractiveness score* (WAS) yang merupakan perkalian bobot dan nilai AS dan kemudian nilai WAS dihitung akumulasinya pada masing-masing strategi untuk menentukan prioritas strategi.

2.4.4 Analisis 5S Partisipatif

Analisis 5S Partisipatif merupakan teknik analisis secara partisipatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi; Source/sumberdaya penting, Stress/Ancaman, Source of Stress/sumber ancaman, Strategy/strategi penanganan dan success/sukses. Analisis ini dilakukan dengan partisipatif bersama masyarakat dengan cara FGD (*Focus Group Discussion*). Langkah-langkah yang dilakukan pada analisis ini antara lain:

A. Identifikasi sumberdaya pesisir

Tahap awal analisis ini diawali dengan menjelaskan definisi sumberdaya pesisir. Kemudian masyarakat menulis potensi sumberdaya pesisir yang ada.

B. Identifikasi kondisi sumberdaya dari waktu ke waktu

Diskusi selanjutnya membahas tentang kondisi sumberdaya pesisir 10 tahun yang lalu, saat ini, dan 10 tahun yang akan datang. Kemudian dilihat tren sumberdaya tersebut apakah menurun, tetap atau meningkat.

C. Identifikasi Ancaman terhadap sumberdaya dan strategi pemecahannya

Diskusi dilakukan untuk membahas ancaman terhadap sumberdaya yang ada, kemudia membahas sumber dari ancaman tersebut atau penyebab ancaman tersebut. Setelah itu dilakukan diskusi untuk rencana pemecahan permasalahan yang ada. Setelah itu dilakukan teknik penilaian pada sumberdaya penting dan ancamannya sehingga diperoleh prioritas strategi penanganan.

2.5 Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap draft rencana pengelolaan dan zonasi yang telah dibuat berdasarkan kajian ilmiah. Konsultasi publik dilakukan dalam bentuk lokakarya sehingga para peserta dapat memberi masukan terhadap draft rencana pengelolaan. Keluaran dari lokakarya ini adalah adanya kesepakatan dan komitmen para pihak terhadap rencana pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh beserta rencana zonasinya.

Konsultasi publik akan dilakukan dua kali sehingga stakeholder terkait dapat memastikan bahwa masukan dan saran untuk perbaikan draft rencana pengelolaan telah di adopsi.

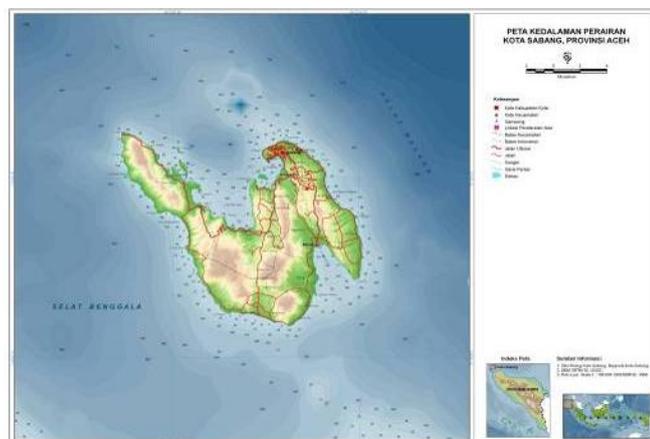
BAB 3. POTENSI

Pesisir Timur Pulau Weh - Kota Sabang mempunyai potensi sumberdaya alam, sosial budaya dan ekonomi yang besar. Potensi ini menjadi salah satu modal bagi Pesisir Timur Pulau Weh dalam pembangunan di masa yang akan datang, Akan tetapi selain potensi, Pesisir Timur Pulau Weh juga mempunyai beberapa ancaman dan permasalahan yang mungkin, dan akan mengganggu di kemudian hari. Untuk itu perlu di lakukan sebuah analisis mengenai semua ancaman dan permasalahan tersebut, sehingga para pemangku kepentingan bisa mengantisipasi dan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3.1 Oseanografi dan Iklim

Secara umum kondisi iklim di Pesisir timur relatif sama dengan wilayah lainnya di Pulau Weh yaitu memiliki 2 musim, musim barat dan musim timur serta 2 musim peralihan. Pada musim barat angin bergerak dari arah barat ke arah timur. Musim barat terjadi pada bulan November hingga Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu yang relatif rendah (26°C) dan curah hujan yang paling tinggi (353,8 mm). Musim timur terjadi ada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur ke arah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara dapat mencapai $28,4^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban udara mencapai pada titik terendah yaitu 73%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin dengan rata-rata kecepatan tertinggi.

Batimetri di Pulau Weh umumnya memiliki kemiringan yang landai khususnya di bagian utara dan selatan Pulau Weh. Hanya di beberapa tempat yang memiliki kemiringan kedalaman yang curam seperti di bagain barat laut dan timur Pulau Weh. Kondisi oseanografi di Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh pola yang ada di Samudra Hindia (Indian Ocean). Menurut Bearman (1993) sirkulasi air di Samudra Hindia berubah mengikuti pola musim. Pada musim timur laut yang terjadi mulai Februari sampai Maret pada wilayah utara dan selatan samudra terjadi arus katulistiwa utara dan arus katulistiwa selatan yang bergerak dari timur ke barat dan di sekitar katulistiwa terjadi arus ekuator yang bergerak sebaliknya dari barat ke timur

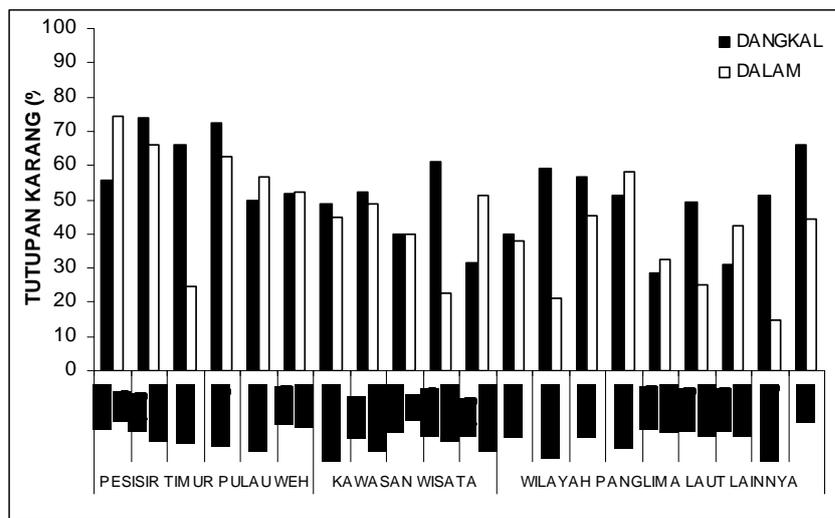


Gambar 2. Peta Batimetri Pulau Weh

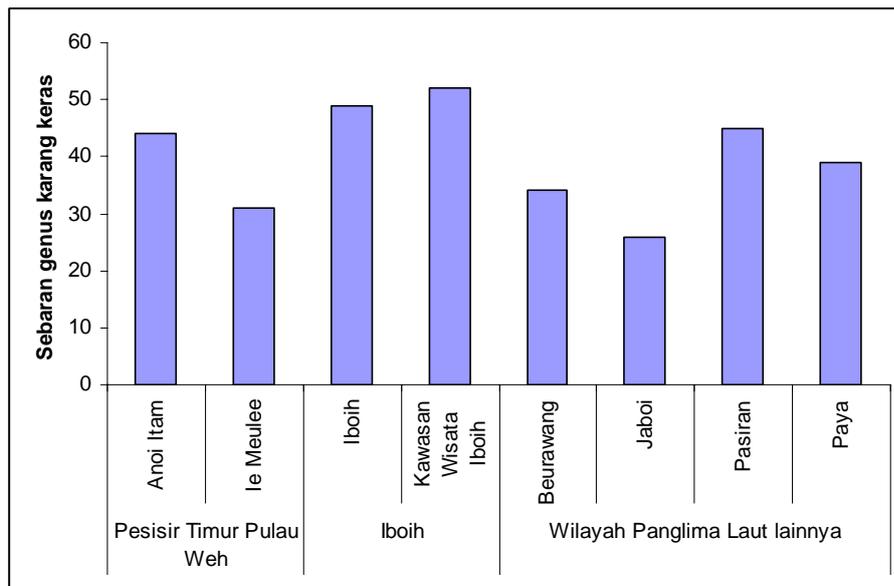
3.2 Sumberdaya pesisir

Wilayah Pulau Weh didominasi oleh ekosistem terumbu karang di hampir seluruh bagian pesisirnya. Tipe terumbu karang yang meliputi Pulau Weh secara morfologi merupakan tipe terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang di Pulau Weh adalah salah satu yang terbaik dan merupakan salah satu pusat keragaman hayati terumbu karang di kawasan barat Indonesia.

Wilayah Pesisir Timur Pulau Weh mempunyai penutupan terumbu karang yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Pulau Weh. Di wilayah ini terumbu karang didominasi oleh karang dari genus: *Acropora*, *Porites*, *Pocillopora* dan *Heliopora*. Selain penutupan karang yang tinggi, wilayah Pesisir Timur Pulau Weh juga memiliki keanekaragaman karang yang tinggi.

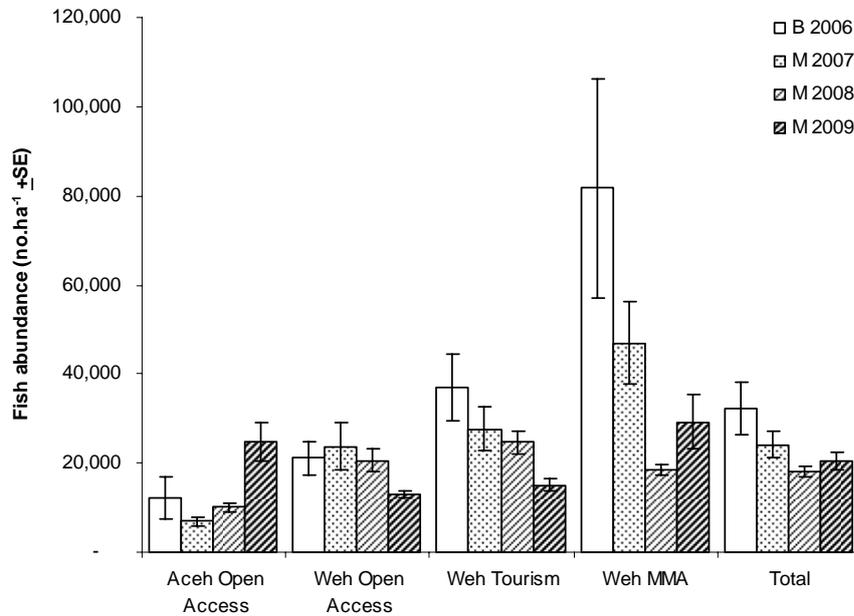


Gambar 3. Perbandingan tutupan karang (%) di setiap wilayah di Pulau Weh (Sumber data: WCS)

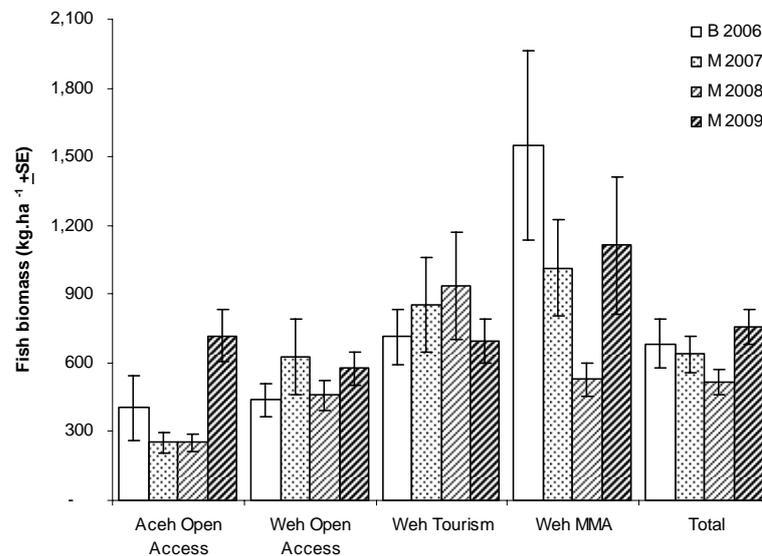


Gambar 4. Sebaran jenis karang di Pulau Weh (Sumber data: WCS)

Penutupan karang yang tinggi di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh, mempunyai hubungan positif dengan kelimpahan dan biomassa ikan karang. Keanekaragaman ikan-ikan karang pantai timur sabang tergolong cukup tinggi dan hampir sama dengan keanekaragaman jenis ikan karang di wilayah wisata Iboih. Selain keanekaragaman yang tinggi, stok ikan karang di pesisir timur sabang cukup tinggi.



Gambar 5. Sebaran kekayaan jenis ikan karang di beberapa wilayah kerja Panglima Laôt di Pulau Weh dan Pulo Aceh (Ardiwijaya *et al.* 2009).



Gambar 6. Biomassa ikan karang di seluruh wilayah Panglima Laôt di Pulau Weh dan Pulo Aceh (Ardiwijaya *et al.* 2009)

Potensi pesisir lainnya yang ada di Pesisir Timur Pulau Weh adalah pantai. Hampir seluruh pantai di pesisir timur memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Pesisir Timur Pulau Weh merupakan wilayah pesisir yang berada di bagian timur Pulau Weh dengan panjang garis pantai ± 15.8 km mulai dari Pantai Paradiso hingga ke Ujung Seukee. Pesisir Timur Pulau Weh secara tradisional terdiri dari dua Lhok yaitu: Lhok Ie Meulee dan Lhok Anoe Itam. Lhok Ie Meulee terdiri dari tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kota Atas, Ie Meulee dan Ujong Kareung. Lhok Anoe Itam meliputi satu kelurahan yaitu Kelurahan Anoe Itam.

Pesisir di pesisir timur Pulau weh dimanfaatkan sebagai sarana perikanan berupa tempat pendaratan perahu (kuala) dan sebagai tempat rekreasi. Tercatat sebanyak 8 pendaratan perahu dalam skala kecil maupun sedang terdapat di wilayah pesisir timur Pulau Weh, 5 tempat pendaratan di wilayah Panglima Laôt Ie Meulee dan 3 tempat pendaratan di wilayah Panglima Laôt Anoe Itam.

Pantai-pantai yang dijadikan sebagai tujuan rekreasi diantaranya: Pantai Kasih, Pantai sumur tiga, Pantai Batee Gajah dan Pantai Aron. Perairan yang jernih, pantai dengan pasir putih dan pemandangan bawah laut yang indah membuat daerah-daerah tersebut menjadi tujuan pariwisata.

3.3 Sosial Budaya

Jumlah penduduk Pesisir Timur Pulau Weh 9.818 jiwa yang terdiri dari 2.421 KK, 4.665 jiwa laki-laki dan 4.891 jiwa perempuan. Penduduk pesisir timur sebagian besar berada di kelurahan Kota atas yaitu sebanyak 1.115 KK. Penduduk kelurahan Ie Meulee sebanyak 984 KK, Kelurahan Ujung Kareung 154 KK dan 168 KK di Kelurahan Anoe Itam (BPS, 2008). Dari total 9.818 jiwa penduduk pantai timur 95 % menganut agama Islam. Penduduk pesisir timur memiliki keanekaragaman suku mulai dari suku Aceh, Batak, Jawa, Sunda, Makasar bahkan Papua karena sebagian penduduk berprofesi sebagai pegawai dan TNI/POLRI.

Tabel 3. Sebaran penduduk di pesisir timur Pulau Weh.

Lhok	Gampong	Populasi			Jumlah KK
		Pria	Wanita	Total	
Ie Meulee	Kuta Ateuh	2.269	2.533	4.802	1.115
	Ie Meulee	1.801	1.651	3.664	984
	Ujong Kareung	2.52	2.58	5.60	154
Anoe Itam	Anoe Itam	3.43	4.49	7.92	168

Karakteristik masyarakat Pesisir Timur Pulau Weh hampir sama dengan masyarakat Sabang dan Aceh pada umumnya yang mempunyai interaksi yang tinggi dan pola gotong royong. Pola kehidupan masyarakat dapat dikategorikan kedalam masyarakat modern. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan alat-alat modern dalam kehidupan sehari-hari seperti TV, telepon seluler, kulkas, bahkan fasilitas yang tergolong mahal seperti motor dan mobil. Pola kehidupan ini sebagai dampak dari status Sabang yang pernah menjadi Pelabuhan Bebas sehingga arus barang dari luar negeri banyak masuk ke Kota Sabang.

3.4 Panglima Laôt

Panglima Laôt merupakan lembaga adat masyarakat nelayan yang terdapat di daerah pesisir Aceh. Panglima Laôt adalah sebuah nama lembaga masyarakat nelayan tersebut dan juga sebutan atau gelar yang diberikan kepada seorang tokoh atau orang yang dipercaya sebagai pemimpin dalam satu kelompok masyarakat nelayan wilayah pesisir yang dikenal dengan istilah Lhok.

Wilayah Lhok memiliki batas-batas wilayah tertentu yang telah disepakati masyarakat serta memiliki aturan adat melaut tersendiri. Selain merupakan tokoh, Panglima Laôt juga sekaligus merupakan istilah untuk lembaga hukum adat tradisional di masyarakat pesisir Aceh yang mengurus aktifitas pe-nangkapan ikan, termasuk aturan-aturan penangkapan dan adat sosial di antara para nelayan

Panglima Laôt telah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14. Hukum Adat Laut mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Samudra Pasai. Di masa lalu, Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan Uleebalang, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman (Wikipedia). Hukum Adat Laut di masyarakat nelayan Aceh umumnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- Tidak tertulis
- Langsung dan nyata
- Bersumber dari kebiasaan hidup yang dipertahankan
- Memiliki sanksi yang belum tegas dan tidak pasti.

Saat ini, seiring dengan perkembangan yang terjadi di Provinsi Aceh, Panglima Laôt tetap menjadi salah satu lembaga yang dipercaya mengatur kegiatan perikanan dan masyarakat nelayan. Tidak banyak berubah dari kondisi di era kolonial, fungsi Panglima Laôt pada era modern adalah sebagai pemimpin dalam urusan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam penangkapan ikan di laut termasuk mengatur tempat atau area penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.

Fungsi Panglima Laôt secara umum meliputi tiga hal penting yaitu menjaga keamanan di wilayah laut, mengatur pengelolaan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Dalam menjalankan fungsi-fungsi Panglima Laôt pada umumnya memiliki tiga kewenangan antara lain mengembangkan dan menegakkan adat laut, mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan dan mengatur peradilan adat laut, Selain hal tersebut di atas fungsi Panglima Laut yang utama adalah untuk menyelesaikan persengketaan antar nelayan dalam penangkapan ikan di laut.

Pada umumnya hukum adat laut mengatur kegiatan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan di suatu lhok. Aturan tersebut merupakan hukum adat yang berlaku bagi setiap nelayan yang melakukan penangkapan di daerah tersebut. Secara garis besar, aturan yang termuat dalam Hukum Adat Laut terdiri dari hari pantang melaut, alat tangkap yang boleh digunakan dan sanksi yang diterapkan dalam pelanggaran hukum adat.

Selain hukum adat laut juga terdapat adat laut yang berhubungan dengan kehidupan nelayan dan peran Panglima Laôt. Adat laut dapat dibedakan menjadi empat kategori : (i) adat sosial, yaitu adat yang berhubungan dengan praktek kehidupan diantara nelayan terutama pada saat kondisi darurat atau musibah; (ii) adat pemeliharaan lingkungan; (iii) adat kenduri laôt, dan (iv) adat barang hanyut. Adat keempat adalah adat pelaporan terhadap pelanggaran atau penangkapan hewan yang memiliki tanda tertentu.

3.4.1 Panglima Laôt Ie Meulee

Pada masa awal keberadaan lembaga Panglima Laôt Ie Meulee (Tahun 1950-an sampai 1980-an), belum ada pengaturan alat tangkap. Hal ini terjadi karena pada masa itu belum ada penggunaan alat tangkap yang merusak. Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, maka metode penangkapan ikan pun ikut berkembang. Di awal tahun 1980-an, aktifitas penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu karang dan merugikan nelayan kecil marak dilakukan di seluruh wilayah Pulau Weh, termasuk di wilayah Panglima Laôt Ie Meulee.

Di era pertengahan tahun 1980-an (sekitar tahun 1985), masyarakat Ie Meulee, terutama kaum nelayan mulai merasakan dampak negatif dari penggunaan alat-alat tangkap tersebut. Oleh karena itu pada pertengahan tahun 1985, masyarakat beserta para pemuka adat di Ie Meulee, membuat kesepakatan adat dengan diberlakukannya pelarangan terhadap alat tangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang, seperti: bom, obat bius, kompresor dan segala jenis jaring yang beroperasi di wilayah terumbu karang.

3.4.2 Lhok Anoe Itam

Panglima Laôt Anoe Itam resmi memisahkan diri dari Panglima Laôt Ie Meulee sejak tahun 1992. Pada awalnya aturan adat Laut di Anoe Itam masih sama dengan aturan adat di Ie Meulee. Di wilayah tersebut dilarang aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Jepang, Jaring Pisang-pisang dan kegiatan penangkapan

ikan lainnya yang merusak dilarang. Pada tahun 2000 nelayan Lhok membuat sebuah kawasan Daerah Perlindungan Laut. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan mereka, terutama dari jenis-jenis ikan karang. Pada bulan November 2007 dibentuk lembaga pengelola yang bertugas mengurus hal-hal teknis pelaksanaan dan pengawasan DPL Anoe Itam, dengan nama Badan Pengelola – Daerah Perlindungan Laut (BP-DPL) Anoe Itam. Lembaga ini berada di bawah pembinaan Panglima Laôt dan Kelurahan Anoe Itam.

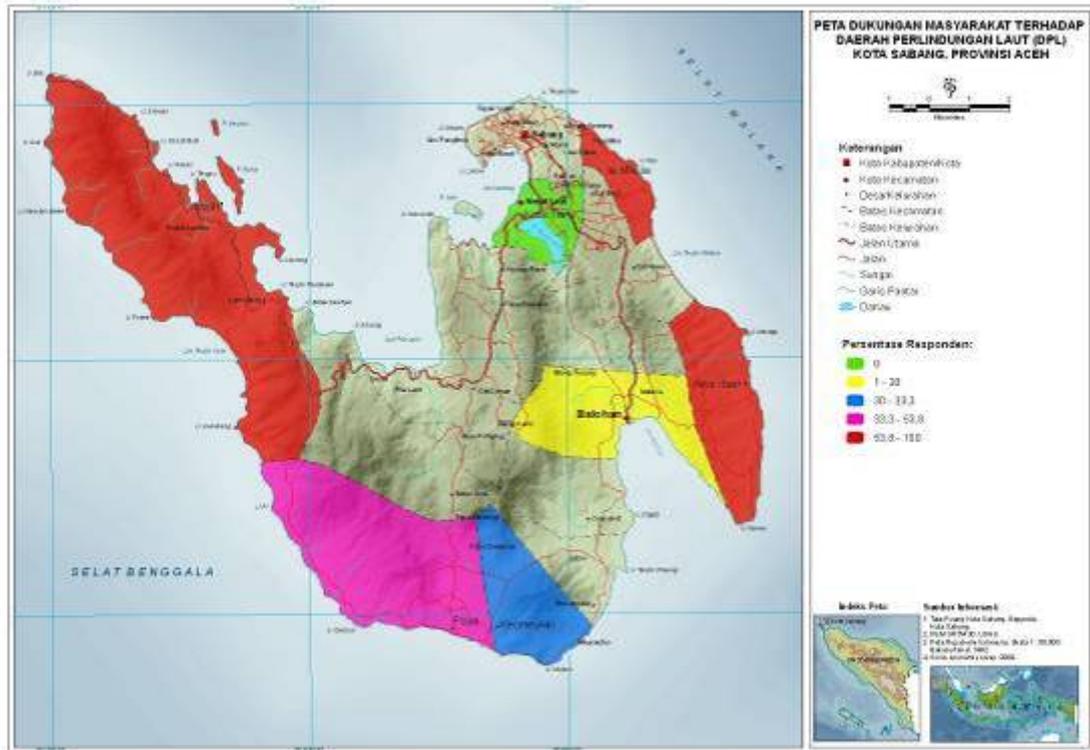
3.5. Dukungan Masyarakat

Pengelolaan laut dan pesisir menjadi isu penting bagi beberapa kabupaten/kota yang memiliki daerah pesisir, terutama untuk kabupaten/kota yang wilayahnya berupa kepulauan. Termasuk di Pulau Weh kota Sabang umumnya dan pesisir timur khususnya, dimana masyarakatnya sangat tergantung terhadap sumberdaya laut dan pesisir.

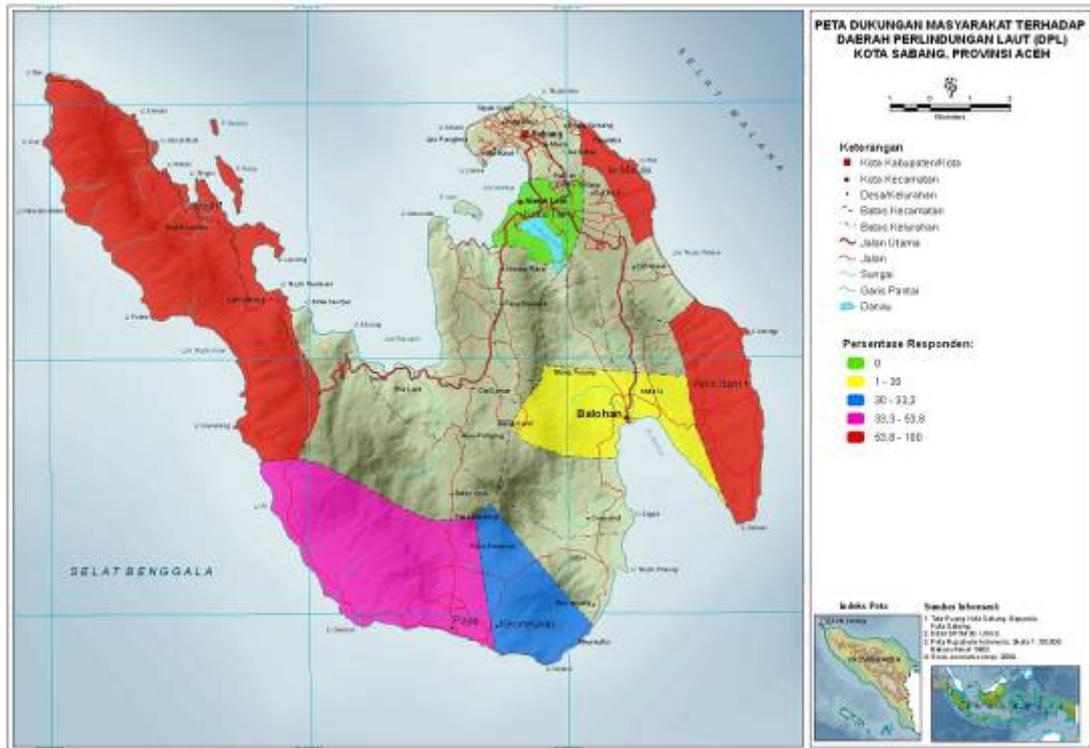
Pengelolaan laut dan sumberdaya pesisir yang baik tidak akan terlepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat, karena disadari atau tidak masyarakat adalah komponen yang paling mengenal kondisi sumberdaya laut dan pesisir. Selain bertindak selaku penerima manfaat dari sumberdaya tersebut, masyarakat bertindak sebagai pihak mengelolanya.

Dukungan dan partisipasi tersebut tidak terlepas dari persepsi masyarakat dalam melihat keberadaan sumberdaya, yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dalam hal ini masyarakat di pesisir timur mempunyai persepsi yang cukup bijak dalam memandang keberadaan sumberdaya laut dan pesisir.

Hal ini dapat terlihat dalam pola pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, dimana mereka melakukan pengaturan alat tangkap sebagai salah satu cara untuk menjamin keberadaan sumberdaya laut dan pesisir dimasa yang akan datang. Selain itu juga persepsi tersebut dapat dilihat dari besarnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Daerah Perlindungan Laut di Kota Sabang. Hal ini disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Wildlife Conservation Society pada tahun 2006.



Gambar 7. Peta pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Daerah perlindungan Laut di Kota Sabang (Yulianto *et al.* 2007).



Gambar 8. Peta dukungan masyarakat terhadap keberadaan Daerah perlindungan Laut di Kota Sabang (Yulianto *et al.* 2007).

Faktor yang mempengaruhi persepsi dan dukungan terhadap pengelolaan yang lebih baik tersebut karena tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Selain itu juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang semuanya diawali oleh hasil tangkapan yang tinggi.

3.6 Ekonomi

Roda perekonomian di pesisir timur Pulau Weh tidak jauh berbeda dari perekonomian Kota Sabang sendiri, dimana perputaran ekonomi didominasi oleh aktivitas pegawai. Sebagian besar penduduk pesisir timur bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, TNI dan Polri 49,5 %, nelayan 4,8 %, dan karyawan swasta 6,7 %. Mata pencaharian nelayan menduduki peringkat ke-6, walaupun demikian wilayah Lhok Ie Meulee merupakan salah satu daerah perikanan yang produktif di Sabang. Banyaknya perkantoran dan gedung pemerintah di wilayah Lhok Ie Meulee membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan catatan, terdapat 17 gedung pemerintahan yang ada di Wilayah Lhok Ie Meulee.

Tabel 4. Mata pencaharian penduduk pesisir timur Pulau Weh.

Mata Pencaharian	Lhok Ie Meulee			Lhok Anoe Itam
	Kuta Ateuh	Ie Meulee	U.Kareung	Anoe Itam
Petani	30	48	50	64
Nelayan	50	75	15	38
Pedagang	157	126	12	33
Angkutan	45	87	15	-
Jasa	58	93	20	-
Buruh	158	125	-	-
Karyawan Swasta	90	156	-	-
PNS	1006	745	40	26
Pensiun	180	133	3	-

Sumber : Data BPS Tahun 2008 dan verifikasi lapangan

Tabel 5. Sarana dan prasarana di pesisir timur Pulau Weh.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Jalan	Aspal	Baik
2	Rumah Sakit	2	Baik
3	Puskesmas	2	Baik
4	Polindes	1	Baik
5	Pustu	3	Baik
6	Posyandu	3	Baik
7	Rumah Pelayanan	-	Baik
8	Kantor Pemerintah	17	Baik
9	Lapangan Olah Raga	5	Baik
10	Balai Nelayan	3	Baik

11	Tempat Pendaratan Ikan	3	Baik
12	Sekolah Dasar	4	Baik
13	SLTP	2	Baik
14	SLTA	1	Baik
15	Perguruan Tinggi	-	-

Sumber : Data BPS Tahun 2008 dan verifikasi lapangan

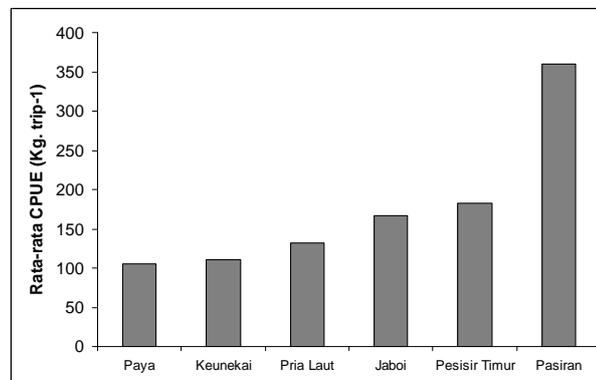
3.6.1 Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Timur Pulau Weh adalah ikan karang dan ikan pelagis. Potensi ikan karang di Pulau Weh dimanfaatkan oleh nelayan Pulau Weh utamanya nelayan pesisir timur, sehingga pesisir timur merupakan salah satu penghasil ikan karang yang utama di Kota Sabang. Ikan-ikan karang yang menjadi komoditi adalah: Ikan kerapu, ikan kakap, ikan Kakak Tua, Ikan ekor kuning Kuwe, Lencam, Reumong, Kurisi, Pisang-pisang dan Ikan merah mata. Selain itu komoditi lain adalah gurita. Untuk ikan pelagis, Ikan-ikan yang menjadi komoditi di daerah pantai timur adalah ikan Tongkol, Tuna, Tenggiri, Kuwe, Layaran dan Cakalang.



Gambar 9. Hasil tangkapan nelayan di Pantai Timur Pulau Weh.

Berdasarkan Survei hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan oleh WCS Indonesia Marine Program, total tangkapan rata-rata per trip mencapai 10.78 kg/trip. Total tangkapan pesisir timur menempati peringkat tertinggi kedua setelah Lhok Pasiran. Jumlah armada yang dimiliki oleh nelayan Pantai timur adalah 112 Kapal. Jumlah armada tersebut digunakan dengan alat tangkap Pancing 61 armada, Tonda (*troolling*) 47 armada, dan *longline* 1 armada dan gillnet 3 (Lampiran 1).



Gambar 10. Rata-rata hasil tangkapan per unit upaya (CPUE) di masing-masing wilayah di Pulau Weh.

3.6.2 Pariwisata

Potensi pariwisata di Pesisir timur Pulau Weh cukup tinggi, khususnya pariwisata pantai. Hampir seluruh pantai di pesisir timur memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Perairan yang jernih, pantai dengan pasir putih dan pemandangan bawah laut yang indah memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, situs sejarah seperti benteng peninggalan jepang juga menjadi daya tarik khusus bagi para wisatawan yang datang ke Sabang. Potensi keindahan ini menjadikan pesisir timur menjadi salah satu tujuan wisata. Dalam dua tahun terakhir perkembangan bungalow dan penginapan-penginapan bagi wisatawan meningkat dengan pesat. Saat ini tercatat sedikitnya ada 8 Bungalow dan penginapan yang ada di sepanjang pantai Pesisir Timur Pulau Weh.



Gambar 11. Pantai dan bungalow yang ada di Pantai timur.

BAB 4. ISU DAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang ada di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh antara lain:

4.1 Degradasi Terumbu Karang

Kondisi terumbu karang di Kota Sabang pada saat ini mengalami penurunan yang nyata. Hal ini terjadi selain akibat gejala alam juga diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Beberapa faktor alam yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang adalah tsunami dan pemanasan global. Pembangunan di daerah pesisir seperti pembangunan pelabuhan, mengakibatkan tingginya sedimentasi sehingga menurunkan kecerahan perairan.

Aktivitas perikanan juga dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang, salah satunya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan kurang bertanggung jawab yang beroperasi di beberapa wilayah luhok di Pulau Weh. Nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan berasal dari Pulau Weh dan luar Pulau Weh. Jenis alat tangkap tersebut antara lain pukat jepang, jaring pisang-pisang, sianida, dan bom. Selain itu, penggunaan jangkar di daerah terumbu karang merupakan faktor lain penyebab kerusakan karang.

Faktor pemanasan global merupakan salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan terumbu karang dunia, termasuk terumbu karang Pulau Weh. Suhu udara yang terus meningkat mengakibatkan suhu permukaan laut menjadi meningkat. Dampaknya terumbu karang dunia mengalami pemutihan atau hilangnya zat warna, dan menjadi tampak putih. Awal bulan Mei 2010 terumbu karang di Kota Sabang mengalami pemutihan masal (*mass coral bleaching*), dan mengakibatkan kerusakan serius.. Ancaman lain bagi terumbu karang Kota Sabang adalah pemangsa karang oleh hewan *Acanthaster plancii* atau bintang laut berduri.

4.2 Eksploitasi Berlebihan Sumberdaya Ikan

Tingginya permintaan dan konsumsi terhadap ikan karang di Pulau Weh, berdampak kepada semakin tingginya tingkat pemanfaatan ikan karang. Hal ini ditambah dengan tingginya harga ikan karang tertentu seperti ikan kerapu dan ikan kakap, menyebabkan kedua ikan tersebut menjadi target utama nelayan di pesisir timur.

Tinggi permintaan dan pemanfaatan tersebut, jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ancaman penurunan jumlah ikan di alam secara drastis yang pada akhirnya berpotensi mengakibatkan overeksploitasi. Ciri dari terjadinya overeksploitasi dapat terlihat dari semakin sulitnya nelayan dalam mendapatkan ikan, serta rata-rata ukuran ikan yang ditangkap semakin kecil dari waktu ke waktu.

Selain tingginya permintaan, semakin banyaknya armada yang beroperasi juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan eksploitasi sumberdaya ikan.

4.3 Penurunan Kualitas Pantai

Pesisir Timur Pulau Weh memiliki panjang garis pantai lebih kurang 15.8 km. Pantai yang terdapat di Pesisir Timur Pulau merupakan salah satu tujuan wisata, baik masyarakat lokal maupun luar Kota Sabang. Dari tahun ke tahun jumlah pengunjung yang menikmati pantai di Pesisir Timur Pulau semakin meningkat terutama pada akhir pekan maupun hari libur besar.

Namun demikian, meningkatnya jumlah pengunjung tidak diikuti oleh pengelolaan yang baik, sehingga salah satu dampaknya adalah semakin banyaknya sampah-sampah di pantai. Pada akhirnya kualitas pantai mengalami penurunan dengan semakin banyaknya sampah yang berserakan.

Selain permasalahan sampah, pantai-pantai di Pesisir Timur Pulau Weh mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini terjadi karena banyaknya pohon pantai yang tumbang atau ditebang oleh masyarakat.

4.4 Konflik Sosial

Panglima Laôt di wilayah Pesisir Timur Pulau Weh dalam hal ini Panglima Laôt Ie meulee dan Anoe itam memiliki aturan adat yang cukup ketat. Mereka melakukan pengaturan alat tangkap, dimana di wilayah Panglima Laôt Ie meulee dan Anoe itam tidak diperkenankan untuk menggunakan semua jenis jaring untuk menangkap ikan. Aturan adat tersebut juga disertai penegakan hukum adat jika terjadi pelanggaran hukum adat.

Pada saat penegakan hukum adat tersebut dijalankan, tidak jarang terjadi gesekan-gesekan dan berpotensi menyebabkan konflik sosial antara nelayan di wilayah Panglima Laôt di Pesisir Timur Pulau Weh dengan nelayan di wilayah Panglima Laôt yang lainnya. Potensi konflik tersebut muncul akibat adanya perbedaan paradigma dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Nelayan di pesisir timur menganggap bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir perlu diatur, karena meyakini bahwa tanpa pengaturan pemanfaatan, maka sumberdaya pesisir akan cepat habis atau langka. Di pihak lain, masih ada sebagian nelayan di Kota Sabang yang masih menganggap sumberdaya pesisir tidak akan pernah habis, karena itu tidak diperlukan pengaturan alat tangkap.

Selain perbedaan persepsi tentang pemanfaatan sumberdaya laut, potensi konflik sosial bisa muncul akibat adanya perbedaan tata batas wilayah Panglima Laôt suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Permasalahan tata batas ini semakin mencuat terkait aturan adat laut seperti Khanduri laut dan pengaturan alat tangkap.

4.5 Melemahnya Penerapan Aturan Adat

Aturan hukum adat laut di wilayah Propinsi Aceh sudah berlangsung sejak jaman Iskandar Muda. Hukum adat ini terus hidup di kalangan masyarakat Aceh termasuk Kota Sabang dan khususnya masyarakat pesisir timur. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan banyaknya budaya luar yang mulai di adopsi, mengakibatkan lunturnya beberapa budaya dan adat termasuk hukum adat laut. Sebagai

akibatnya penerapan hukum adat laut semakin melemah dan tidak jarang hukum adat laut tidak lagi menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik di wilayah laut dan pesisir.

Melemahnya penerapan hukum adat laut juga terjadi akibat kurangnya alih pengetahuan dan pemahaman adat dari para tetua kepada generasi muda, sehingga pemahaman tentang hukum adat laut hanya terbatas pada kalangan tetua.

4.6 Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Permasalahan - permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan sumberdaya dan dampak jangka panjang dari kerusakan sumberdaya tersebut. Beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan kurangnya kesadaran adalah penebangan pohon pantai, aktivitas buang sampah di pantai, penangkapan ikan ukuran kecil, pemakaian jangkar di lokasi yang kurang tepat, dan aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan karang terinjak dan rusak.

BAB 5. ANALISIS RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

5.1 Analisis Rencana Pengelolaan

5.1.1 Dasar Hukum dan Kebijakan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik dalam hal penetapan ataupun pengelolaan suatu kawasan di Nangroe Aceh Darussalam adalah:

- a. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHA&E).
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. UU Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
- d. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- e. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- g. UU Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- h. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- m. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan

Selain beberapa undang-undang di atas terdapat beberapa beberapa Qanun Pemerintahan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sumber lain sebagai bahan analisis seperti;

- a. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- b. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.

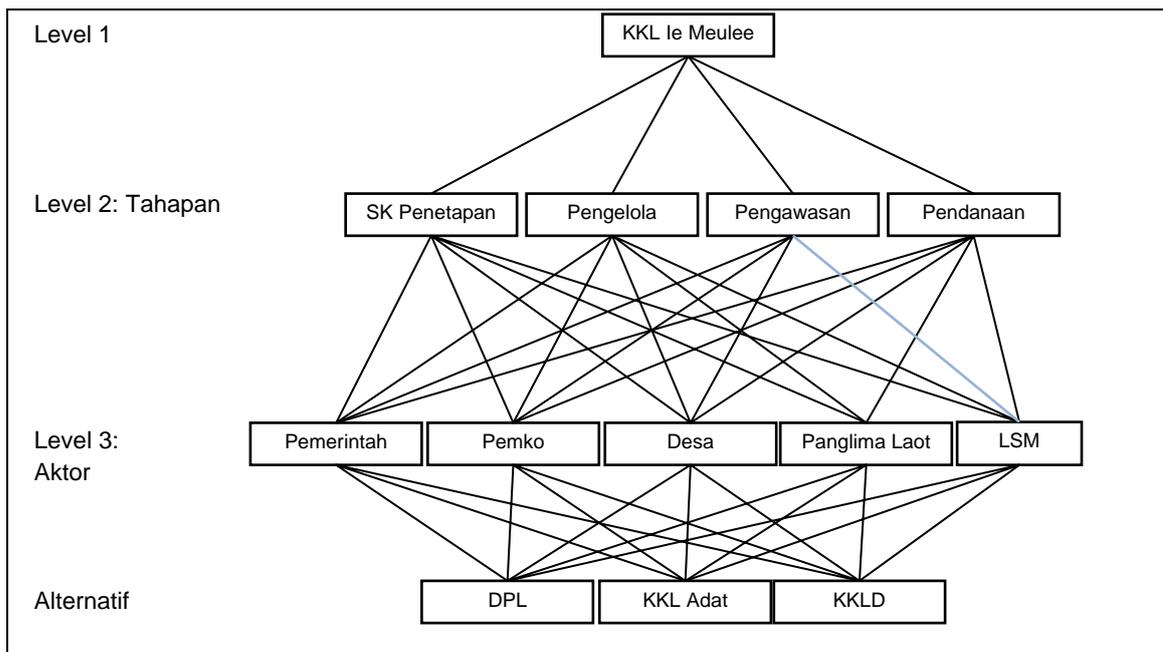
- c. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- d. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- e. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- f. Hukum Adat Laut Sabang

5.1.2 Analitical Hierarchy Process (AHP)

Dalam Analisis ini struktur AHP terdiri dari 3 level yaitu; level 1: *goal* yang merupakan pemilihan jenis kawasan konservasi yang sesuai di wilayah Mukim Ie Meulee, level 2: tahapan yang merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk pengembangan kawasan konservasi, dan level 3: aktor yang merupakan aktor-aktor yang akan berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi.

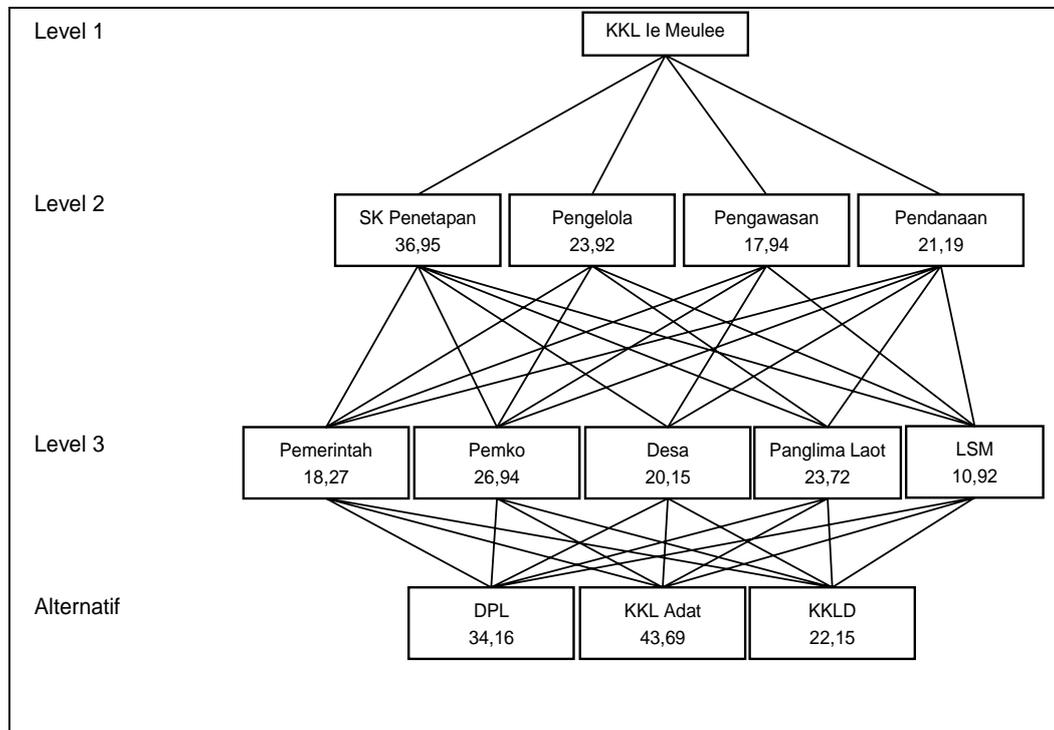
Alternatif dalam pengembangan kawasan konservasi adalah Daerah Pelindungan Laut (DPL), Kawasan Konservasi Laut Adat (KKL Adat), dan Kawasan Konservasi Laut Daerah. DPL adalah kawasan konservasi berbasis masyarakat dimana seluruh pengelolaan dan pengaturannya dilakukan oleh masyarakat. Luas DPL umumnya relatif kecil yang terdiri dari zona inti dan zona penyangga. KKL Adat adalah kawasan konservasi yang dikelola bersama antar pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki peranan utama dalam pengaturan kawasan tersebut. KKLD adalah kawasan konservasi yang berbasis pemerintah dimana kawasan tersebut ditetapkan, dikelola dan diatur oleh pemerintah.

Berdasar gambaran opsi-opsi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kawasan konservasi laut atau kawasan kelola laut maka, disusun struktur masalah sebagai berikut:



Gambar 12. Struktur AHP.

Responden pada AHP adalah sebanyak 8 orang yang merupakan staf Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Sabang, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Kota Sabang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Sabang, Imam Mukim Ie Meulee, Lurah Ie Meulee, Panglima Laôt Lhok Ie Meulee dan Anoe Itam dan staf Yayasan Pugar. Penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penilaian rata-rata dari seluruh responden disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Hasil Penilaian Para Pihak.

5.1.3 Analisis SWOT

Berdasarkan FGD dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh, maka teridentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Kekuatan (S):

1. Memiliki potensi sumberdaya pesisir yang cukup baik dan masih dapat dimanfaatkan
2. Adanya dukungan politis dari pemerintah kota sabang
3. Adanya dukungan masyarakat setempat
4. Adanya aturan adat yang mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan
5. Berjalannya penegakan hukum adat oleh masyarakat
6. Merupakan daerah tujuan wisata yang berkembang
7. Aksesibilitas yang cukup baik
8. Wilayahnya mudah untuk di awasi

Kelemahan (W):

1. Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan pantai
3. Masih kurangnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan
4. Masih rendahnya SDM bidang pariwisata

Peluang (O):

1. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara
2. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
3. Adanya Investor di bidang pariwisata

Ancaman (T):

1. Masih adanya persoalan tata batas kawasan
2. Masih adanya pelanggaran aturan adat laut oleh nelayan luar
3. Potensi konflik horisontal antar para pengguna sumberdaya
4. Pemutihan karang (*coral bleaching*)

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka disusun kerangka strategi pengelolaan dengan mengkombinasikan masing-masing faktor. Strategi hasil kombinasi masing-masing faktor disajikan dalam bentuk matriks yang tersaji pada Tabel 6. Kemudian masing-masing faktor juga ditentukan bobot dan rankingnya untuk menentukan strategi terpilih. Bobot dan ranking masing-masing disajikan pada Tabel 7 dan 8. Nilai total dari masing-masing faktor diplot dalam diagram matrik IE (Internal Eksternal) untuk menentukan strategi terpilih. Matriks IE disajikan pada Gambar 14.

Tabel 6. Matriks SWOT Pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh.

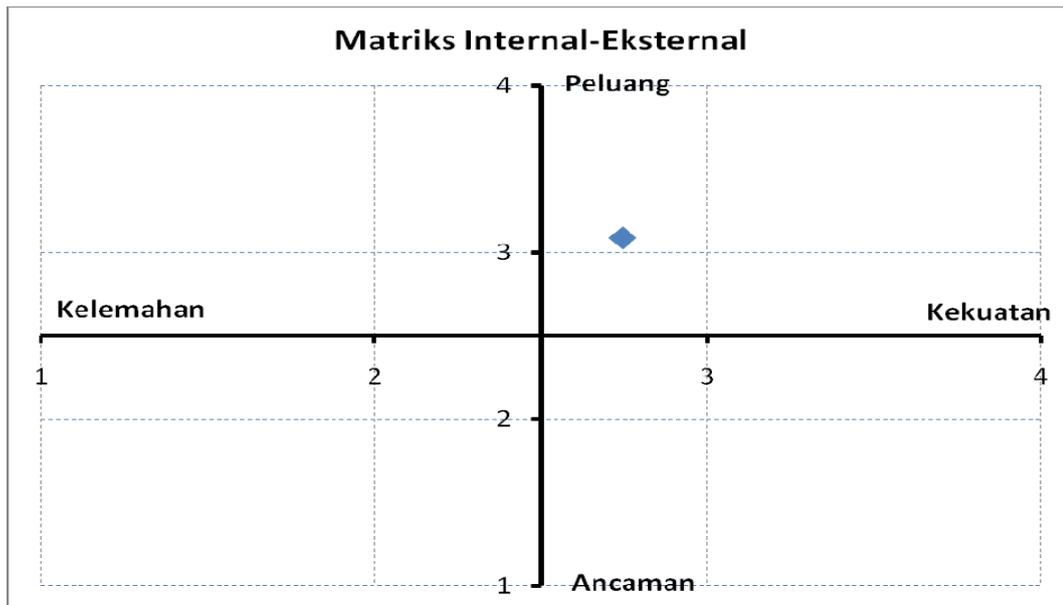
	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi sumberdaya pesisir yang cukup baik dan masih dapat dimanfaatkan 2. Adanya dukungan politis dari pemerintah kota sabang 3. Adanya dukungan masyarakat setempat 4. Adanya aturan adat yang mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan 5. Berjalannya penegakan hukum adat oleh masyarakat 6. Merupakan daerah tujuan wisata yang berkembang 7. Aksesibilitas yang cukup baik 8. Wilayahnya mudah untuk di awasi 	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan pantai 3. Masih kurangnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan 4. Masih rendahnya SDM bidang pariwisata
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara 2. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 3. Adanya Investor di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga potensi sumberdaya pesisir yang ada sebagai daya tarik utama kawasan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, melalui penerapan aturan adat laut dan program-program lain yang mendukung kelestarian sumberdaya pesisir. (SO-1) 2. Memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung pengelolaan kawasan dan pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan adat istiadat setempat. (SO-2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan dan SDM bidang pariwisata (WO-1) 2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan pantai serta peningkatan SDM masyarakat, khususnya di bidang pariwisata guna mengantisipasi peningkatan sektor pariwisata. (WO-2) 3. Perbaiki koordinasi antar sektor dan pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan kawasan. (WO-3)
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya persoalan tata batas kawasan 2. Masih adanya pelanggaran aturan adat dari nelayan luar, karena perbedaan aturan adat 3. Potensi konflik horisontal antar para pengguna sumberdaya 4. Pemutihan karang (Coral Bleaching) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dukungan politis dari pemerintah Kota Sabang dan pendekatan adat untuk penyelesaian tata batas kawasan 2. Menggunakan pendekatan adat untuk pelanggaran adat dan mengurangi potensi konflik horisontal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi ancaman terhadap sumberdaya pesisir dan potensi konflik horisontal dengan peningkatan SDM pihak pengelola

Tabel 7. Matriks Faktor Eksternal

Peluang:	Rangking	Bobot	Total
1. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	0.13	3.00	0.38
2. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	0.15	4.00	0.60
3. Adanya Investor di bidang pariwisata	0.11	2.00	0.21
Ancaman:			
1. Masih adanya persoalan tata batas kawasan	0.15	3.00	0.45
2. Masih adanya pelanggaran aturan adat dari nelayan luar, karena perbedaan aturan adat	0.17	4.00	0.68
3. Potensi konflik horisontal antar para pengguna sumberdaya	0.13	2.00	0.26
4. Pemutihan karang (Coral Bleaching)	0.17	3.00	0.51
	1		3.09

Tabel 8. Matriks Faktor Internal

Kekuatan:	Rangking	Bobot	Total
1. Memiliki potensi sumberdaya pesisir yang cukup baik dan masih dapat dimanfaatkan	0.09	3	0.27
2. Adanya dukungan politis dari pemerintah kota sabang	0.08	4	0.31
3. Adanya dukungan masyarakat setempat	0.10	4	0.41
4. Adanya aturan adat yang mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan	0.09	3	0.27
5. Berjalannya penegakan hukum adat oleh masyarakat	0.08	4	0.31
6. Merupakan daerah tujuan wisata yang berkembang	0.09	3	0.27
7. Aksesibilitas yang cukup baik	0.09	2	0.18
8. Wilayahnya mudah untuk di awasi	0.10	2	0.21
Kelemahan:			
1. Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola	0.08	3	0.23
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan pantai	0.05	1	0.05
3. Masih kurangnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan	0.09	2	0.18
4. Masih rendahnya SDM bidang pariwisata	0.06	1	0.06
	1		2.74



Gambar 14. Matrik Internal-Eksternal (IE) Pengembangan KKP Pesisir Timur Pulau Weh

Berdasarkan Matrik IE di atas, maka strategi yang terpilih adalah strategi yang mengkombinasikan kekuatan dan peluang (SO) dan strategi yang mengkombinasikan peluang dan kelemahan (WO). Masing-masing strategi kemudian di tentukan prioritasnya. Penentuan prioritas masing-masing strategi disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Matriks Penentuan Rangkaing Strategi Pengelolaan.

Faktor	Rangking	SO -1		S0-2		WO-1		WO-2		WO-3	
		AS	WAS	AS	WAS	AS	WAS	AS	WAS	AS	WAS
Peluang:											
1. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	0,13	3	0,38	4	0,51	3	0,38	4	0,51	2	0,26
2. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	0,15	2	0,30	3	0,45	4	0,60	3	0,45	2	0,30
3. Adanya Investor di bidang pariwisata	0,11	2	0,21	3	0,32	3	0,32	3	0,32	3	0,32
Ancaman:											
1. Masih adanya persoalan tata batas kawasan	0,15	2	0,30	3	0,45	1	0,15	1	0,15	1	0,15
2. Masih adanya pelanggaran aturan adat laut oleh nelayan luar	0,17	3	0,51	1	0,17	1	0,17	2	0,34	1	0,17
3. Potensi konflik horisontal antar para pengguna sumberdaya	0,13	3	0,38	1	0,13	1	0,13	2	0,26	1	0,13
4. Pemutihan karang (Coral Bleaching)	0,17	1	0,17	1	0,17	1	0,17	1	0,17	1	0,17
Kekuatan:											
1. Memiliki potensi sumberdaya pesisir yang cukup baik dan masih dapat dimanfaatkan	0,09	4	0,36	2	0,18	2	0,18	3	0,27	1	0,09
2. Adanya dukungan politis dari pemerintah kota sabang	0,08	3	0,23	3	0,23	3	0,23	3	0,23	3	0,23
3. Adanya dukungan masyarakat setempat	0,10	4	0,41	3	0,31	2	0,21	3	0,31	2	0,21
4. Adanya aturan adat yang mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan	0,09	4	0,36	3	0,27	1	0,09	2	0,18	1	0,09
5. Berjalannya penegakan hukum adat oleh masyarakat	0,08	4	0,31	2	0,15	1	0,08	1	0,08	1	0,08
6. Merupakan daerah tujuan wisata yang berkembang	0,09	3	0,27	2	0,18	2	0,18	3	0,27	4	0,36
7. Aksesibilitas yang cukup baik	0,09	3	0,27	3	0,27	1	0,09	3	0,27	4	0,36
8. Wilayahnya mudah untuk di awasi	0,10	2	0,21	1	0,10	1	0,10	2	0,21	1	0,10
Kelemahan:											
1. Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola	0,08	3	0,23	3	0,23	4	0,31	2	0,15	3	0,23
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan pantai	0,05	1	0,05	1	0,05	2	0,10	4	0,21	2	0,10
3. Masih kurangnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan	0,09	2	0,18	1	0,09	2	0,18	3	0,27	4	0,36
4. Masih rendahnya SDM bidang pariwisata	0,06	1	0,06	3	0,19	4	0,26	4	0,26	3	0,19
			5,19		4,45		3,91		4,88		3,89

5.1.4 Analisis 5S Partisipatif

Setelah dilakukan diskusi terfokus bersama masyarakat di dua wilayah Panglima Laôt, maka disusun matriks yang terdiri dari sumberdaya penting, ancaman terhadap sumberdaya penting, sumber ancaman dan strategi penanganan. Matriks tersebut disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11 untuk masing-masing wilayah Panglima Laôt.

Tabel 10. Matriks Sumberdaya, Ancaman dan Strategi Penanganan Lhok Ie Meulee

No	Sumberdaya Penting	Ancaman	Sumber Ancaman	Strategi Penanganan
1	Ikan Karang	Pemanfaatan berlebih	Permintaan yang tinggi	Pekerjaan alternatif terutama bidang perikanan contoh budidaya
			Banyaknya nelayan dan kurangnya alternatif mata pencaharian	
		Pemanfaatan ikan karang dibawah ukuran (ikan-ikan kecil ditangkap)	Kesadaran nelayan yang masih rendah	Peningkatan kesadaran dengan kampanye melalui media umum
2	Ikan Pelagis	-	Cuaca	
3	Pantai	Sampah	Tidak ada tempat sampah	Pembuatan tempat pembuangan sampah
		Abrasi	Penebangan pohon Rendahnya kesadaran	Pembuatan DAM atau pemecah ombak
			Penambangan pasir dan batu akibat tidak alternatif untuk bahan bangunan	Kejelasan hukum mengenai pengambilan pasir dan batu
				Penyadaran melalui media kampanye

Tabel 11. Matriks Sumberdaya, Ancaman dan Strategi Penanganan Lhok Anoe Itam

No	Sumberdaya Penting	Ancaman	Sumber Ancaman	Strategi Penanganan
1	Terumbu Karang, Ikan Karang dan Lobster	Penggunaan alat tangkap yang merusak	Penegakan hukum yang masih lemah	Mengutkan adat dalam bentuk tranfer ilmu, membangun kekompakan dan keberanian
			Adanya oknum aparat/tokoh yang terlibat	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum Koordinasi dengan pemerintah, aparat dan para tokoh masyarakat
		Rusak	Terinjak	Pembuatan tanda-tanda dan papan informasi
			Akibat jangkar	Pembuatan Pelampung tambat
2	Ikan Pelagis	Berkurangnya pakan ikan pelagis di terumbu karang	Penggunaan jaring	(sama dengan di atas)
		Rumpon	Rumpon	Koordinasi pengaturan rumpon
3	Pantai	Abrasi	Abrasi	Penanaman pohon pantai
		Kotoran Ternak	Kesadaran Masyarakat yang masih rendah	Pembuatan dam
		Sampah		Pembuatan papan informasi untuk penyadaran
4	Pohon pantai	Abrasi	Abrasi	Pembuatan papan informasi untuk penyadaran
		Tidak ada peremajaan	Kesadaran Masyarakat yang masih rendah	
		Membakar ikan di akar pohon pantai		

5.2 Analisis Rencana Zonasi

Analisis zonasi di kawasan konservasi perairan Pesisir Timur Pulau Weh menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis hukum dan kebijakan serta *analitical hierachy proccess*. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh dinas yang membidangi bidang kelautan dan perikanan dan dinas pariwisata, zonasi di KKP Pesisir Timur Pulau Weh harus memperhatikan kondisi yang ada saat ini (*existing condition*) dan aturan adat yang berlaku. Kondisi yang ada saat ini adalah adanya daerah perlindungan laut dan daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata. Aturan adat yang berlaku adalah aturan adat mengenai pengaturan alat tangkap.

BAB 6. OPSI-OPSI RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

6.1 Opsi-opsi Rencana Pengelolaan

6.1.1 Opsi Kelembagaan

Berdasarkan kajian hukum dan kebijakan maka opsi kelembagaan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah;

1. Pengelola merupakan Panglima Laôt di masing-masing lhok atau lembaga yang ditunjuk oleh Panglima Laôt.
2. Pengelola dibentuk di masing-masing gampong berdasarkan keputusan kheucik dimana di tingkat mukim di bentuk forum koordinatif lembaga pengelola.
3. Pengelola merupakan dinas yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.
4. Pengelola merupakan lembaga setingkat badan (Badan Layanan Umum) dibawah Walikota Sabang.

Pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Panglima Laôt relatif lebih efektif dibandingkan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (McClanahan *et al.* 2006). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kawasan konservasi laut yang dikelola oleh pemerintah, pengelolaan kawasan konservasi laut yang dikelola oleh masyarakat adalah memiliki kelemahan dalam hal keberlanjutan pendanaan. Berdasarkan hasil kesepakatan maka lembaga pengelola terdiri dari dua lembaga yaitu dinas yang membidangi bidang kelautan dan perikanan dan Panglima Laôt dimasing-masing lhok.

6.1.2 Opsi Strategi Pengelolaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan analisis 5S Partisipatif maka strategi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan merehabilitasi potensi sumberdaya pesisir yang ada sebagai daya tarik utama kawasan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, melalui penerapan aturan adat laut dan program-program lain yang mendukung kelestarian sumberdaya pesisir.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan pantai dan kelestarian sumberdaya alam.
- 3) Memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung pengelolaan kawasan dan pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan adat istiadat setempat.
- 4) Memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM Pengelolan Kawasan dan SDM bidang pariwisata
- 5) Perbaiki koordinasi antar sektor dan pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan kawasan.

6.2 Opsi-opsi Zonasi

Secara umum nelayan wilayah Lhok Anoe Itam dan Lhok Ie Meulee menginginkan aturan adat tentang pengaturan penggunaan alat tangkap khususnya jaring di KKP Pesisir Timur Pulau Weh dijadikan aturan zona. Nelayan sadar bahwa dengan menggunakan jaring maka sumberdaya perikanan yang dimiliki akan habis sehingga para nelayan tidak dapat mencari makan lagi. Wilayah ini dijadikan *zona perikanan berkelanjutan*.

Aturan pembatasan alat tangkap jaring (dalam hal ini alat tangkap jaring yang telah dimodifikasi/modern) telah sejalan dengan beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan teknis yang mengatur tentang pelarangan penggunaan alat tangkap modern di wilayah terumbu karang adalah SK menteri pertanian nomor 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Alat Tangkap. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa alat tangkap yang boleh beroperasi di wilayah terumbu karang (0-3 mil laut) adalah alat tangkap tradisional yang belum di modifikasi dan menggunakan mesin perahu di bawah 5 GT. Hal ini jelas bahwa alat tangkap jaring yang telah di modifikasi hanya boleh beroperasi di atas 3 mil laut.

Selain keputusan menteri tersebut, Qanun Provinsi NAD nomor 20 tahun 2002 pada Pasal 18 menyebutkan tentang ketentuan konservasi sumberdaya alam di bidang kelautan dan perikanan meliputi:

- a. Alat tangkap dan tata cara penangkapan ikan
- b. Jumlah, jenis serta ukuran ikan yang boleh ditangkap
- c. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungan
- e. Penebaran ikan jenis baru atau eksotik
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan yang ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan gubernur.

Berdasarkan qanun tersebut sangat jelas bahwa Pemerintah Provinsi Aceh juga mengatur tentang pengaturan alat tangkap.

Selain pengaturan alat tangkap, masyarakat juga menginginkan pengaturan daerah larang ambil yang telah ditetapkan masyarakat sebelumnya untuk dijadikan *zona inti*. Hal ini telah sejalan dengan beberapa peraturan mulai dari undang-undang sampai dengan qonun di Provinsi Aceh dimana masyarakat dapat menentukan daerah larang ambil dengan beberapa pertimbangan kelestarian. Dasar pertimbangannya adalah, setiap peraturan yang mengatur tentang pengembangan kawasan konservasi laut baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri ataupun qanun ikut mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi yang memberikan ruang pada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan konservasi. Salah satu bentuk kegiatan konservasi tersebut adalah pembuatan kawasan larang ambil. Pengaturan-pengaturan dalam kawasan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat penting bagi keberhasilan kawasan konservasi tersebut. Christie *et al.* (2002)

menyebutkan bahwa jika kawasan konservasi tidak diatur oleh masyarakat maka kawasan konservasi tersebut berpotensi akan gagal.

Selain pengaturan alat tangkap dan wilayah larang ambil beberapa lokasi di wilayah Pesisir timur merupakan wilayah pemanfaatan wisata. Wilayah ini diajukan sebagai **zona pemanfaatan**. Wilayah-wilayah tersebut antara lain kawasan pantai seperti Pantai Paradiso, Pantai Kasih dan Pantai Tapak Gajah di Gampong Kuta Ateuh, Pantai Sumur Tiga di Gampong Ie Meulee, Pantai Mata Ie (Alue Reuteuk), Batee Dua dan Batee Gajah di Gampong Anoe Itam, yang diperuntukan bagi wisata bahari (rekreasi pantai) keluarga.

BAB 7. PENUTUP

Buku rencana pengelolaan ini disusun untuk melengkapi syarat bagi pengelolaan KKP Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang. Rencana pengelolaan kawasan konservasi yang baik harus didasarkan atas data dan informasi dasar yang ada di wilayah tersebut, melalui proses analisis yang matang. Data dan informasi dalam buku rencana pengelolaan ini meliputi sumberdaya hayati dan non hayati, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, serta informasi terkait lainnya.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan KKP Pantai Timur Pulau Weh. Buku ini tersusun berkat upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Kami sadar tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan rencana pengelolaan ini. Oleh karena itu semua kritik, masukan, dan saran akan memberikan kontribusi positif bagi penyempurnaan rencana pengelolaan ini.

Akhir kata kami berharap bahwa buku ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung kegiatan konservasi perairan di Pulau Weh khususnya, di Aceh pada umumnya.

Lampiran 1. Alat tangkap dan armada penangkapan di pesisir timur Pulau Weh.

Tabel 1. Jumlah Alat Tangkap.

No	LHOK	Tonda	Pancing	Gillnet	Pukat cincin	Pukat jepang	Kompresor	Jaring pisang2	RAWAI	Jaring ikan hias	Jaring Kelambu
1	Anoe Itam	14	32	3					1		
2	Ie Meulee	32	29								

Tabel 2. Jumlah Armada

No	Lhok	Kategori Kapal															Total	
		Samp an/Katir	Robin (1-5 PK)	15 PK	25 PK	40 PK	8 PK	16 PK	23 PK	26 PK	30 PK	32 PK	D 14	D 15	D 16	PS 120		90 GT
1	ANOE ITAM	22	5	1			4	1	4	1								38
2	IE MEULEE	17	7	2	1	1	5		8	15	2	4						62